

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terselesaikannya dokumen Rencana Kerja Tahun 2021 Dinas Sosial Kota Pontianak ini sebagai penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Pontianak Tahun 2020 - 2024

Di dalam dokumen ini memuat konsep, rencana kerja, indikator kinerja, dan pendanaan pada Dinas Sosial Kota Pontianak.

Ucapan terima kasih dan penghargaan kami sampaikan kepada semua pihak yang ikut andil untuk menyumbangkan pemikiran, ide dan tenaga guna menyelesaikan dokumen ini. Kami berupaya menyajikan informasi dengan selengkap-lengkapnyanya walaupun disadari masih terdapat kelemahan dan kekurangan dalam penyajiannya.

Selanjutnya masukan dan saran senantiasa kami harapkan demi perbaikan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021 Dinas Sosial Kota Pontianak. Semoga Rencana Kerja Dinas Sosial Kota Pontianak Tahun 2021 ini dapat menjadi masukan bagi semua pihak dan dapat direalisasikan sesuai rencana.

Kepala Dinas Sosial
Kota Pontianak,



drh. ASWIN DJA'FAR
Pembina Utama Muda IV / c
Nip. 19630901 199103 1 007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	5
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	5
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	18
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	24
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	25
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	25
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	27
3.1 Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial	27
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	30
4.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	30
4.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	31
4.3 Program dan Kegiatan	33
BAB V PENUTUP	44

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1(satu) tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Perubahan Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis (5) lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra Perangkat Daerah kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sebagai sebuah dokumen resmi Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Renja Perangkat Daerah disusun oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pontianak dan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Propinsi dan APBN.

Dokumen Renja Perangkat Daerah pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan Perangkat Daerah. Kualitas dokumen Renja sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Renja Perangkat Daerah sangat ditentukan oleh kemampuan Perangkat Daerah dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

Berdasarkan Permendagri No.54 Tahun 2010 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah,

proses penyusunan Renja Perangkat Daerah terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan, dan tahap penetapan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Tahapan persiapan meliputi pembentukan tim penyusunan RKPD dan Renja Perangkat Daerah, orientasi mengenai RKPD dan Renja Perangkat Daerah, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi. Penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja Perangkat Daerah yang definitif.

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan focus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renja Perangkat Daerah. Tahap penetapan rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala Perangkat Daerah menetapkan Renja Perangkat Daerah untuk menjadi pedoman dilingkungan Perangkat Daerah dalam menyusun program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah pada tahun anggaran berkenaan.

1.2 Landasan Hukum

Adapun Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Sosial Kota Pontianak Tahun 2021 yaitu :

- 1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 3) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 4) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4817);
- 8) Peraturan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2016 tentang RKP Tahun 2017;
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Nrgara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 11) Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 07 Tahun 2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- 12) Peraturan Walikota Pontianak Nomor 68 Tahun 2016 tanggal 8 Desember 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Pontianak.

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Dinas Sosial Kota Pontianak Tahun 2021 merupakan dokumen resmi perencanaan Perangkat Daerah yang menggambarkan Strategi atau Kebijakan Umum serta Program dan Kegiatan Strategis yang akan dicapai dalam rangka penyelenggaraan Pembangunan Daerah Kota Pontianak di bidang urusan Sosial.

Rencana Kerja Dinas Sosial Kota Pontianak ditetapkan dengan maksud :

- a. Memberikan arah dan pedoman bagi jajaran di lingkungan Dinas Sosial Kota Pontianak dalam menentukan strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2021 sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Pontianak Tahun 2020-2024.
- b. Sebagai pedoman dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program dan kegiatan Dinas Sosial Kota Pontianak pada Tahun 2021.
- c. Sebagai Dokumen Perencanaan yang dijadikan pedoman atau acuan dalam menyusun Rencana Kerja Dinas Sosial Kota Pontianak.

Adapun Tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Kota Pontianak adalah

- a. Menyediakan Dokumen Rencana Kerja keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan untuk Pimpinan dan seluruh Pegawai secara sistematis untuk Tahun anggaran yang akan datang.

- b. Mengoptimalkan tercapainya pelaksanaan program dan kegiatan yang bertujuan untuk menurunkan angka kemiskinan .
- c. Menetapkan komitmen kinerja (Performance Agreement) yang disepakati agar terciptanya integrasi, sinkronasi dan sinergi antara Pimpinan dan Pegawai yang dapat dijadikan tolak ukur kinerja organisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang diemban dan dilaporkan dalam Pengukuran Kinerja Kegiatan.

1.4 Sistematika Penulisan

Penulisan Rencana Kerja Perubahan ini dengan sistematika meliputi:

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 4.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 4.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- 4.3 Program dan Kegiatan

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra Dinas Sosial Kota Pontianak

Dalam Rangka mengimplementasikan perencanaan strategis Dinas Sosial Kota Pontianak Tahun 2015 – 2019 guna mencapai sasaran yang tertuang dalam Visi dan Misi Walikota Pontianak Tahun 2015 - 2019, maka sasaran prioritas Dinas Sosial Kota Pontianak :

1. Meningkatnya Kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
2. Meningkatnya Peran PSKS dalam penanganan permasalahan Kesejahteraan Sosial.

Berangkat dari sasaran tersebut kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun periode tahun 2015-2019 adalah sesuai dengan target indikator capaian kinerja yang telah ditetapkan, dimana hasil capaian tersebut menunjukkan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2015-2019.

Review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja pada Dinas Sosial Tahun 2019 (n-1) dan perkiraan capaian pada tahun 2020 (Tahun Berjalan) , dapat tergambar pada Anggaran dan Realisasi APBD pada tahun yang bersangkutan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Sosial Kota Pontianak tahun lalu bertujuan untuk mengetahui capaian sasaran-sasaran yang diinginkan, Dinas Sosial Kota Pontianak telah menyusun anggaran dan melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang diperlukan sesuai dengan target kinerja yang disepakati bersama. Adapun Rekapitulasi Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Sosial Kota Pontianak dan Pencapaian Renstra Dinas Sosial Kota Pontianak sampai dengan Tahun 2020 dapat dilihat dengan tabel sebagai berikut :

TABEL 2.1

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DINAS SOSIAL KOTA PONTIANAK
DAN PENCAPAIAN RENSTRA DINAS SOSIAL KOTA PONTIANAK SAMPAI DENGAN TAHUN 2020

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/OUTCOME/KEG IATAN /OUTPUT	TARGET KINERJA PROGRAM (RENSTRA PERANGKA T DAERAH TAHUN 2019	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU 2019			URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD S/D TAHUN 2020	
				TARGET RENJA PD TAHUN 2019	REALISASI RENJA PD TAHUN 2019	TINGKAT REALISASI (%)			REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2020	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
	WAJIB									
	BIDANG SOSIAL									
	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase (%) Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	2.650.827.046	2.590.334.343	97,72	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	7.183.296.444	5.012.630.385	69,78
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Pelayanan lain-lain jasa surat menyurat	12 Bulan	20.000.000	19.995.000	99,98	Gaji dan Tunjangan	5.189.016.860	3.536.831.978	68,16
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi listrik air dan telpon	12 Bulan	356.273.046	312.483.781	87,71	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	20.000.000	13.280.000	66,40

	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	12 Bulan	150.000.000	149.966.500	99,98	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	312.582.248	194.135.145	62,11
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	85.000.000	84.962.850	99,96	Penyediaan Alat Tulis Kantor	140.275.536	140.186.100	99,94
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersediaanya komponen instalasi listrik/penerangan gedung kantor	12 Bulan	22.000.000	21.986.400	99,94	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	60.000.000	52.457.550	87,43
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan peraturan per undang-undangan	12 Bulan	6.000.000	4.180.000	69,67	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000	9.697.800	96,98
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya kebutuhan makanan dan minuman tamu dan rapat	12 Bulan	109.000.000	108.951.500	99,96	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	880.000	880.000	100,00
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Tersedianya kebutuhan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 Bulan	491.245.000	491.239.912	100,00	Penyediaan Makanan dan Minuman	70.000.000	57.445.000	82,06
	Penyediaan Jasa Teknis Administrasi Perkantoran	Tersedianya Pelayanan lain lain jasa kantor	12 Bulan	279.305.000	272.100.000	97,42	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	125.154.000	125.039.200	99,91
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	12 Bulan	359.190.000	358.780.000	99,89	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	339.595.000	250.045.000	73,63
	Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pengamanan Kantor	Tersedianya jasa dan sarana kebersihan	12 Bulan	686.764.000	686.563.400	99,97	Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pengamanan Kantor	915.792.800	632.632.612	69,08

	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Tersedianya kebutuhan rapat-rapat dan konsultasi dalam daerah	12 Bulan	37.750.000	37.325.000	98,87	Sosialisasi Penyelenggaraan Pembangunan di Kota Pontianak	-	-	0,00
	Sosialisasi Penyelenggaraan Pembangunan di Kota Pontianak	Terlaksananya pameran inovasi	12 Bulan	48.300.000	41.800.000	86,54	PENINGKATAN SARANA PRASARANA DAN PERLENGKAPAN KANTOR	634.309.600	629.662.840	99,27
	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Terciptanya Kelancaran Pelayanan Aparatur dan Masyarakat	100%	540.640.000	510.645.350	94,45	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	61.709.600	60.734.840	98,42
	Rehabilitasi Gedung Kantor	Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor	1 Paket	95.420.000	95.311.000	99,89	Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor	144.050.000	143.140.000	99,37
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas dan operasional	25 Unit	129.380.000	129.289.750	99,93	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	114.330.000	112.118.000	98,07
	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional	12 Bulan	17.700.000	17.700.000	100,00	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Roda 4	314.220.000	313.670.000	99,82
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Jasa Pemeliharaan Barang Inventaris Kantor	8 Unit	80.100.000	79.794.400	99,62	PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	3.000.000	3.000.000	100,00
	Pengadaan Mebeleur	Terlaksananya mebeleur OPD	12 Bulan	11.910.000	9.970.000	83,71	Pendidikan dan Pelatihan Formal	3.000.000	3.000.000	100,00
	Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya perlengkapan dan peralatan gedung kantor	4 Paket	206.130.000	178.580.200	86,63	PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA	18.792.000	8.146.250	43,35
	PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase(%) terpenuhinya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100%	13.000.000	8.800.000	67,69	Penyusunan Rencana Kerja (Renja)	10.017.000	5.387.500	53,78

	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan aparatur	12 Bulan	13.000.000	8.800.000	67,69	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	8.775.000	2.758.750	31,44
	PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA	Persentase (%) Laporan Capaian Kinerja sesuai ketentuan yang berlaku	100 %	91.000.000	90.230.000	99,15	PENINGKATAN DISIPLIN DAN KINERJA APARATUR	-	-	0,00
	Penyusunan Rencana Kerja (Renja)	Tersedianya Renja,RKA, dan RKA Perubahan	3 Laporan	32.500.000	31.730.000	97,63	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	-	-	0,00
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	Tersedianya LAKIP, LPPD dan PKK	8 Laporan	29.750.000	29.750.000	100,00	PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN KEUANGAN	2.350.000	-	0,00
	Penyusunan Evaluasi dan Analisis Jabatan OPD	Tersedianya evaluasi dan analisis jabatan OPD	100%	20.600.000	20.600.000	100,00	Penyusunan Laporan Keuangan	2.350.000	-	0,00
	Penyusunan Revisi RENSTRA	Tersedianya revisi RENSTRA	1 laporan	8.150.000	8.150.000	100,00	PENINGKATAN PELAYANAN PRIMA	8.050.000	8.050.000	100,00
	PENINGKATAN DISIPLIN DAN KINERJA APARATUR	Persentase (%) Disiplin Apatur Berpakaian Dinas sesuai ketentuan yang berlaku	100 %	49.320.000	45.778.600	92,82	Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat	-	-	0,00
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Tersedianya PSH untuk Eselon II, Pakaian Seragam Pegawai dan Baju Batik Khas Daerah	100%	49.320.000	45.778.600	92,82	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	8.050.000	8.050.000	100,00
	PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN KEUANGAN	Persentase (%) Meningkatnya kualitas laporan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku	100 %	17.750.000	17.750.000	100,00	Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)	-	-	0,00
	Penyusunan Laporan Keuangan	Tersedianya laporan keuangan semesteran akhir tahun	1 laporan	17.750.000	17.750.000	100,00	PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI	-	-	0,00

	PENINGKATAN PELAYANAN PRIMA	Tingkat Efektifitas monitoring dan evaluasi kegiatan penanganan masalah kesejahteraan sosial Kota Pontianak	100%	115.425.000	113.861.000	98,65	Penyusunan Data dan Profil OPD	-	-	0,00
	Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat	Tersusunnya laporan IKM	1 laporan	13.800.000	13.800.000	100,00	PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI	50.000.000	48.620.000	97,24
	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Tersedianya Kebutuhan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan PMKS	12 Bulan	83.500.000	81.950.000	98,14	Pemeliharaan dan Pemutakhiran Website (Pengelolaan Website)	50.000.000	48.620.000	97,24
	Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)	Tersedianya kebutuhan standar operasional prosedur (SOP)	12 Bulan	18.125.000	18.111.000	99,92	Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	479.522.000	362.037.319	75,50
	PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI	Persentase (%) kualitas data/informasi Dinas Sosial yang update	100%	64.900.000	57.950.000	89,29	Mayat Terlantar dan Otopsi	31.000.000	19.950.000	64,35
	Penyusunan Data dan Profil OPD	Terlaksananya Penyusunan Data dan Profil OPD	1 laporan	24.900.000	18.700.000	75,10	Operasional Pelayanan PMKS Dalam Unit Pelayanan Rehabilitasi Sosial (UPRS)	221.000.000	166.320.000	75,26
	Pemeliharaan dan Pemutakhiran Website (Pengelolaan Website)	Terlaksananya Penyusunan Data dan Profil OPD	12 Bulan	40.000.000	39.250.000	98,13	Operasional Penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)	11.372.000	5.775.000	50,78
	PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI	Persentase (%) Pengembangan Data Sistem Informasi	100%	84.830.000	80.835.000	95,29	Pelayanan Bagi Penderita Psykotik Terlantar	16.500.000	10.197.319	61,80
	Pembuatan Software Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT)	Tersedianya pemenuhan website dinas	100%	84.830.000	80.835.000	95,29	Pembinaan dan Stimulan Bagi Pekerja Sex Komersial	-	-	0,00
							Satgas Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Kota Pontianak	192.150.000	153.145.000	79,70

	Bantuan Sosial Korban Bencana	Persentase (%) korban bencana skala kota yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100%	494.655.000,00	466.405.250,00	94,29	Penanganan Gepeng/Orang Terlantar	7.500.000	6.650.000	88,67
	Bantuan Kepada Panti Asuhan/Panti Sosial	Jumlah bantuan kepada panti asuhan / panti sosial	28 Panti	235.860.000,00	226.178.150,00	95,90	Pemberdayaan Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	910.827.000	910.499.120	99,96
	Bantuan Sarana Prasarana Panti Asuhan / Panti Sosial	Jumlah yang disediakan bantuan sarana prasarana panti asuhan/ panti sosial	28 Panti	137.970.000,00	137.685.500,00	99,79	Pelatihan Keterampilan Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)/ Pelatihan SATPAM	574.415.000	574.415.000	100,00
	Operasional Tanggap Darurat Bencana Alam dan Sosial	Jangka waktu operasional tanggap darurat dan bencana alam	12 Bulan	43.500.000,00	39.080.000,00	89,84	Bantuan Stimulan Usaha Ekonomi Produktif Terhadap Keluarga Miskin	336.412.000	336.084.120	99,90
	Pemulangan Gepeng/Orang Terlantar	Jumlah pemulangan gepeng/ orang terlantar	25 orang	49.100.000,00	35.961.600,00	73,24	Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	855.139.000	594.629.050	69,54
	Verifikasi dan Validasi Bencana Kebakaran dan Puting Beliung	Jangka waktu verifikasi dan validasi bencana kebakaran dan puting beliung	12 Bulan	28.225.000,00	27.500.000,00	97,43	Operasional Pusat Layanan Anak Terpadu (PLAT)	210.955.000	154.069.550	73,03
	Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase (%) PMKS skala kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	100%	1.540.682.500,00	1.413.077.388,00	91,72	Pembinaan TKSK, PSM dan Organisasi Sosial	228.250.000	134.707.500	59,02

	Mayat Terlantar dan Otopsi	Jumlah mayat terlantar yang dapat ditangani	15 mayat	49.000.000,00	39.700.000,00	81,02	Penguatan Komunitas Beresiko (ODHA)	-	-	0,00
	Operasional Pelayanan PMKS dalam unit pelayanan rehabilitasi (UPRS)	Jumlah pelayanan PMKS dalam UPRS	12 Bulan	459.325.000,00	400.394.500,00	87,17	Peringatan Hari Pahlawan Nasional	-	-	0,00
	Operasional Penanganan Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH)	Jumlah penanganan ABH	12 Bulan	18.500.000,00	14.700.000,00	79,46	Operasional Kegiatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	-	-	0,00
	Pelayanan Bagi Penderita Psykotik Terlantar	Jumlah pelayanan bagi orang gila	30 orang	86.340.000,00	64.231.924,00	74,39	Pendamping Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT)	275.434.000	217.227.000	78,87
	Pembinaan dan Stimulan Bagi Pekerja Sex Komersial	Jumlah pembinaan stimulan bagi waria	10 orang	38.200.000,00	37.525.000,00	98,23	Fasilitasi Lembaga Lanjut Usia (LU)	-	-	0,00
	Pembinaan Gepeng/Orang Terlantar	Jumlah gepeng yang di bina/ ditangani	10 orang	58.192.500,00	56.855.400,00	97,70	Fasilitasi Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI)	-	-	0,00
	Satgas Penyandang Masalah kesejahteraan Sosial Kota Pontianak	Jangka waktu satgas penyandang masalah kesejahteraan sosial kota pontianak	25 orang	287.530.000,00	279.866.000,00	97,33	Jaring Pengaman Sosial	140.500.000	88.625.000	63,08

	Pembinaan Anak Diluar Panti	Jumlah peserta pembinaan anak di luar panti	10 orang	53.500.000,00	53.321.200,00	99,67	Peringatan Hari Berkabung Daerah	-	-	0,00
	Rehab Sosial Anak Terlantar	Jumlah Anak Terlantar Yang di Rahabilitasi	10 orang	70.800.000,00	70.664.000,00	99,81	Pembinaan Para Penyandang Disabilitas dan Trauma	-	-	0,00
	Pelatihan Keterampilan Bagi Anak Terlantar	Jumlah Peserta Pelatihan Bagi Anak Terlantar	10 orang	194.830.000,00	193.889.000,00	99,52	Pelatihan Keterampilan Bagi Penyandang Cacat dan Eks Trauma	-	-	0,00
	Pelayanan Bagi Lansia Tidak Potensial	Jumlah peserta pelayanan bagi lansia	120 orang	148.065.000,00	147.706.000,00	99,76	Pembinaan Eks Napza	-	-	0,00
	Rehab Sosial Lansia Terlantar Luar Panti	Jumlah Lansia Terlantar Yang di Rahabilitasi	12 Bulan	76.400.000,00	54.224.364,00	70,97	Perlindungan dan Jaminan Sosial	2.296.838.385	1.656.402.605	72,12
	Pemberdayaan Fakir Miskin dan Penyandang masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Persentase (%) PMKS skala kota yang menerima program pemberdayaan sosial atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	100%	1.550.825.000,00	1.545.548.845,00	99,66	Penanganan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)/ Kartu Indonesia Sehat (KIS)	158.800.000	139.998.000	88,16
	Pelatihan Keterampilan Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Jumlah peserta pelatihan ketrampilan bagi PMKS	12 Orang	918.715.000,00	917.564.200,00	99,87	Fasilitasi, Koordinasi dan Monev Pendamping Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)	610.840.000	489.340.000	80,11
	Bantuan Stimulan Usaha Ekonomi Produktif Terhadap Keluarga Miskin	Jumlah peserta pelatihan UEP dan bantuan stimulan bagi keluarga miskin	25 UEP	535.630.000,00	534.644.645,00	99,82	Verifikasi dan Validasi Bencana Kebakaran dan Putting Beliung	1.500.000	900.000	60,00

	Pelatihan Kepada Anak Panti Asuhan	Jumlah panti yang dibina	10 orang	96.480.000,00	93.340.000,00	96,75	Bantuan Kepada Panti Asuhan/Panti Sosial	-	-	0,00
	Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Persentase (%) jumlah pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial	100%	2.673.329.250,00	2.635.669.638,00	98,59	Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH)	236.110.885	130.110.855	55,11
	Operasional Pusat Layanan Anak Terpadu (PLAT)	Jangka waktu operasional PLAT	12 Bulan	263.850.000,00	249.602.808,00	94,60	Fasilitasi Kelompok Usaha Bersama dari Kementerian Sosial RI	26.450.000	26.450.000	100,00
	Pembinaan TKSK, Karang Taruna, PSM, dan Organisasi Sosial	Jumlah peserta TKSK, Karang Taruna dan PSM	29 PSM/6 TKSK	88.600.000,00	88.600.000,00	100,00	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	1.263.137.500	869.603.750	68,84
	Pendamping Program Keluarga harapan (PKH)	Jumlah Pendampingan untuk Program Keluarga Harapan	53 Pendamping	729.838.000,00	726.775.830,00	99,58	Rehabilitasi Sosial	34.125.000	34.125.000	100,00
	Pendampingan Pembinaan E-Warung	Jumlah pendamping pembinaan E-warung	12 Bulan	473.931.250,00	471.919.000,00	99,58	Rehabilitasi dan Pengadaan Peralatan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) (DAK)	-	-	0,00
	Penguatan Komunitas Beresiko (ODHA)	Jumlah penguatan komunitas beresiko (ODHA)	20 orang	23.905.000,00	23.905.000,00	100,00	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	10.875.000	10.875.000	100,00

	Peringatan Hari Berkabung Daerah dan Hari Pahlawan Nasional	Jumlah Peringatan Hari Berkabung Daerah dan Hari Pahlawan Nasional	1 kegiatan	33.750.000,00	33.745.000,00	99,99	Lanjut Usia Terlantar	23.250.000	23.250.000	100,00
	Operasional Kegiatan Lembaga Konsultasi Keluarga (LK3)	Jumlah konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3)	36 orang	38.800.000,00	38.700.000,00	99,74	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandang dan Pengemis di Luar Panti	-	-	
	Pendamping Sistem layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT)	Jumlah Pengaduan pada SLRT	5000 pengaduan	777.355.000,00	776.122.000,00	99,84				
	Fasilitas Lembaga Lanjut Usia (LU)	Jangka waktu fasilitas LLI kota pontianak	1 lembaga	35.400.000,00	22.075.000,00	62,36				
	Fasilitas Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI)	Jumlah Lembaga Yang di fasilitas	1 lembaga	20.900.000,00	19.725.000,00	94,38				
	jaring Pengaman Sosial	Jumlah pengaduan yang mendapatkan penanganan	750 penanganan	187.000.000,00	184.500.000,00	98,66				
	Pembinaan Para Penyandang Disabilitas dan Trauma	Persentase (%) penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan social	100%	354.205.000,00	350.545.000,00	98,97				

	Pelatihan Keterampilan Bagi Penyandang cacat dan Eks Trauma	Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan bagi penyandang disabilitas	30 orang	85.750.000,00	85.600.000,00	99,83				
	Pembinaan Eks Trauma	Eks Trauma yang mendapatkan pembinaan	40 orang	58.020.000,00	57.886.500,00	99,77				
	Pembinaan Anak Disabilitas	Jumlah peserta pembinaan dan bantuan stimulan anak disabilitas	10 orang	61.770.000,00	59.673.000,00	96,61				
	Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas	Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan Rehabilitasi	15 orang	148.665.000,00	147.385.500,00	99,14				
	Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Persentase (%) penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya yang dilayani	100%	1.454.673.750,00	12.840.144.764,00	882,68				
	Penanganan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS/Kartu Indonesia Sehat (KIS)	Jumlah penanganan kartu keluarga sejahtera (KKS) / kartu indonesia sehat (KIS)	1500 KPM	198.100.000,00	198.076.125,00	99,99				

	Penginputan data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBIJK)	Jumlah penginputan data penerima bantuan iuran jaminan kesehatan (PBI-JK)	35000 Jiwa	545.443.750,00	545.138.000,00	99,94				
	Fasilitasi Kelompok Usaha Bersama Dari Kementerian Sosial Republik Indonesia	Jumlah fasilitasi kelompok usaha bersama dari kementerian sosial RI	30 PS & Penyedia	156.400.000,00	154.824.500,00	98,99				
	Fasilitasi, Koordinasi dan Monev Pendamping Bantuan pangan Non Tunai (BPNT)	Jumlah fasilitasi, koordinasi dan monev pendampingan pangan nontunai (BPTN)	15343 KPM	554.730.000,00	549.326.050,00	99,03				
				11.696.062.546,00	11.392.780.089,00	97,41		12.476.249.429,00	9.267.802.569,00	74,28

Dari Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa hasil review terhadap evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Sosial Tahun 2019 sebagai berikut :

1. Sejalan dengan visi, misi dan arah kebijakan umum APBD tahun 2019, alokasi anggaran keseluruhan Dinas Sosial Kota Pontianak mencapai Rp. 15.397.470.546,00 (*Belanja Tidak langsung Rp. 3.701.408.000,00 dan Belanja Langsung Rp. 3.186.633.946,00*) dan sampai dengan triwulan ke IV telah terealisasi sebesar Rp. 14.579.414.035,00 (*Belanja Tidak Langsung Rp. 3.186.633.946,00 dan Belanja Langsung Rp. 11.392.780.089,00*) atau 94,69 %. Yang terdiri dari 15 program **dan 73 kegiatan**

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pembentukan Dinas Sosial Kota Pontianak sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Perangkat Daerah, Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan, Rumah Sakit, Puskesmas dan Staf Ahli ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Adapun Capaian Indikator Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kota Pontianak yaitu :

Dalam rangka meningkatkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota Pontianak dan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak telah dilaksanakan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Renstra 2015-2019.

Berdasarkan Renstra hasil reviu tersebut, Dinas Sosial Kota Pontianak memiliki 2 (dua) Indikator dengan pencapaian kinerja pada Tahun 2019 sebagai berikut :

1. PERSENTASE PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) MANDIRI

Target pada indikator ini sebesar 61 % dan telah terealisasi sebesar 61% atau nilai capaiannya mencapai 100% . Adapun capaian tersebut didukung pelaksanaan 2 (dua) program dengan 10 (sepuluh) kegiatan dan total anggaran yang terserap sebesar Rp. 1.462.687.250,000 dari jumlah pagu anggaran sebesar Rp.

Adapun Program dan Keegiatannya sebagai berikut :

A. PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN DAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL(PMKS) LAINNYA.

Pelaksanaan Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan bagi fakir miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya, dengan melakukan pelatihan keterampilan, memberikan bantuan stimulan usaha ekonomi produktif terhadap keluarga miskin. Pemenuhan Kebutuhan bagi Penyandang Disabilitas, Adapun alokasi anggaran melalui program ini sebesar Rp. 1.550.825.000,00 dan sampai dengan Bulan Desember 2019 telah terealisasi sebesar Rp. 1.545.548.845,00 atau 99,66% dari realisasi anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 3 kegiatan yaitu

- Pelatihan Keterampilan Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
- Bantuan Stimulan Usaha Ekonomi Produktif Terhadap Keluarga Miskin
- Pelatihan Kepada Anak Panti Asuhan

2. Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang aktif dalam penanganan Permasalahan Kesejahteraan Sosial

Fungsi dan tugas Aparatur Sipil Negara yaitu pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik dan perekat bangsa. Salah satu proses mewujudkan suatu tata pemerintahan yang baik adalah melalui pelayanan publik. Pelayanan publik dapat diartikan sebagai kegiatan pelayanan yang dilakukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan hak – hak dasar setiap warga negara atas suatu barang, jasa dan atas pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan yang terkait dengan kepentingan publik. Pelayanan publik merupakan tanggung jawab pemerintah baik pusat maupun daerah.

Target pada indikator ini sebesar 59 % dan telah terealisasi sebesar 54 % atau nilai capaiannya mencapai 91,50% . Adapun capaian tersebut didukung pelaksanaan 2 (dua) program dengan 5 (lima) kegiatan dan total anggaran yang terserap sebesar Rp. 1.159.968.000,00 dari jumlah pagu anggaran sebesar Rp. 1.132.439.480,00

Adapun Program dan Kegiatannya sebagai berikut :

1. Program Bantuan Sosial Korban Bencana

- Bantuan Kepada Panti Asuhan /Panti Sosial
- Bantuan Sarana dan Prasarana Panti Asuhan/Panti Sosial

2. Program Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial

- Fasilitasi Lembaga Lanjut Usia
- Fasilitasi Para Penyandang Disabilitas Indonesia
- Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH)

Adapun Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang Aktif Dalam Penanganan Permasalahan Kesejahteraan Sosial yang mendapat pelayanan rehabilitasi Kesejahteraan Sosial yang dijadikan sebagai ukuran capaian target kinerja yaitu :

- a. Pemberian Bantuan Sembako kepada 24 Panti Asuhan berupa :
 - Beras 10 Kg sebanyak 920 Karung
 - Minyak goreng 2 Liter sebanyak 350 Bungkus
 - Indomie sebanyak 96 Kardus
 - Kacang Merah sebanyak 24 Bungkus
 - Gula Pasir sebanyak 470 Bungkus
 - Susu Kental Manis sebanyak 380 Kaleng
 - Telur Ayam sebanyak 2770 Butir
 - Kacang Hijau sebanyak 260 Kg
- b. Pemberian Bantuan Sarana dan Prasarana kepada 24 Panti Asuhan berupa
 - Kasur dan Sarung sebanyak 170 Buah
 - Handuk sebanyak 60 Lembar
 - Selimut sebanyak 60 Lembar
 - Bantal dan Sarung Bantal sebanyak 55 Buah
 - Karpet sebanyak 10 Bal
- c. Pemberian Bantuan kepada Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) berupa :
 - Komputer sebanyak 1 Unit
- d. Pemberian Bantuan kepada Lembaga Lanjut Usia (LU) berupa :
 - Komputer sebanyak 1 Unit
- e. Memfasilitasi Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) agar bantuan untuk penerima Bansos Program Keluarga Harapan (PKH) dapat tepat sasaran berupa :
 - Terselenggaranya E-Waroeng sebagai penyalur Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sebanyak 52 warung

- Melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap E-Waroeng dan Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH)

TABEL 2.2
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS SOSIAL
KOTA PONTIANAK

NO	INDIKATOR	SPM /STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	
1	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Mandiri			61%	-	-	-	61%	-	-	-	
2	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang aktif dalam penanganan permasalahan Kesejahteraan Sosial			59%	-	-	-	54%	-	-	-	
3	Perentase Peningkatan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	-	-	-	80%	81%	81,50%	-	78%	81%	81,50%	

4	Persentase Kepuasan Pelayanan Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	-	-	-	80%	84%	87%	-	82%	82%	86%	
---	---	---	---	---	-----	-----	-----	---	-----	-----	-----	--

2.3 Isu-Isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Pembentukan Dinas Sosial Kota Pontianak sesuai dengan Perda Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah untuk mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Rasional, Proporsional, Efektif, dan Efisien yang didasarkan pada Asas Efisiensi, Efektifitas, Pembagian habis tugas, Rentang Kendali, Tata kerja yang jelas dan Fleksibilitas antara penyelenggara urusan Pemerintahan pada bidang Sosial menjadi kewenangan daerah

Berdasarkan Perda tersebut, maka keluarlah peraturan Walikota Pontianak Nomor 08 Tahun 2016 tentang Kedudukan Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Pontianak. Adapun peraturan dimaksud dapat digambarkan Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Pontianak adalah sebagai berikut :

1. Tugas Pokok

Dinas Sosial Kota Pontianak mempunyai tugas pokok membantu Walikota melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan di bidang Sosial.

2. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Sosial Kota Pontianak mempunyai fungsi yang meliputi :

- a. Perumusan Kebijakan di Bidang Sosial
- b. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Sosial
- c. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Sosial
- d. Pelaksanaan Administrasi Dinas Sosial
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial

Secara umum isu-isu penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat daerah yang berdasarkan kajian hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2019 yaitu dalam upaya pencapaian Indikator Kinerja ditetapkan strategi sebagai berikut:

1. Untuk tahun anggaran berikutnya, dalam perencanaan untuk penentuan besaran anggaran harus disesuaikan dengan output kegiatan yang dihasilkan sehingga sisa anggaran atau pun kurang terserapnya anggaran dapat diminimalisir.

2. Komitmen yang tinggi dari Dinas Sosial Kota Pontianak untuk mengurangi angka kemiskinan dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) di Kota Pontianak.
3. Melakukan persiapan pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan sebelum anggaran disahkan, agar tepat waktu dan tepat sasaran sesuai perencanaan yang telah ditetapkan dalam DPA.
4. Untuk pengesahan DPPA agar sesuai dan tepat waktu sehingga seluruh kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan perubahan anggaran yang telah ditetapkan.

2.4 REVIEW TERHADAPA RANCANGAN AWAL RKPD

Dari rancangan awal yang telah disusun pada Dinas Sosial telah disesuaikan dengan perencanaan bappeda. Rencana Kerja (Renja) merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Sosial Dan Kota Pontianak, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam Dokumen Rencana Kerja (Renja) memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kota Pontianak. Di samping itu, dokumen rencana kerja (Renja) juga memuat informasi tentang program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen Renja ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Sosial Kota Pontianak.

2.5 PENELAAHAAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan gabungan antara usulan masyarakat dan rencana kerja Pemerintah Daerah setiap tahunnya yang disahkan melalui rapat paripurna oleh DPRD. Usulan dari masyarakat ditampung dalam wadah Musrenbang yang terlebih dahulu dimulai dari Musrenbang tingkat kelurahan sampai Musrenbang tingkat kota. Hasil usulan Musrenbang digunakan sebagai bahan untuk menyusun rancangan renja Perangkat Daerah. Penyusunan rancangan renja dibahas dalam forum Perangkat Daerah berkoordinasi dengan Bappeda. Tujuan

pembahasan rancangan renja adalah sinkronisasi dan penyelarasan program dan kegiatan serta penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sebagai upaya dalam mensinergikan pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran pembangunan daerah sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Renja Tahun 2021 Dinas Sosial Kota Pontianak tidak adanya usulan program dan kegiatan yang bersumber dari masyarakat.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 TUJUAN DAN SASARAN DINAS SOSIAL KOTA PONTIANAK

3.1.1 Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi Kepala Daerah yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1-5 Tahun. Penetapan tujuan dalam Rencana Kerja didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama urusan Dinas Sosial Kota Pontianak. Adapun Tujuan Renstra 2020-2024 Dinas Sosial Kota Pontianak adalah sebagai berikut :

1. Menurunnya Kemiskinan

3.1.2 Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/ dihasilkan secara nyata oleh Dinas Sosial Kota Pontianak. Oleh karenanya rumusan sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program operasional dan kegiatan pokok organisasi yang bersifat spesifik,terinci dapat terukur dan dapat di capai. Adapun yang menjadi sasaran dalam Renstra 2020- 2024 Dinas Sosial Kota Pontianak sebanyak 2 (dua) sasaran yaitu :

1. Meningkatnya Penanganan Program Kemiskinan
2. Meningkatnya Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Perlindungan Jaminan Sosial

Sasaran organisasi yang ditetapkan pada dasarnya merupakan bagian dari proses perencanaan strategis dengan fokus utama berupa tindakan pengalokasian sumber daya organisasi ke dalam strategi organisasi. Guna memenuhi kriteria tersebut maka penetapan sasaran harus disertai dengan penetapan indikator sasaran, yaitu keterangan gejala atau penanda yang dapat digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan upaya pencapaian sasaran atau dengan kata lain disebut sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.

Strategi untuk mencapai visi dan misi Dinas Sosial Kota Pontianak dihasilkan dari posisi Strategis hasil analisa lingkungan yaitu S – O (*Strengths – Opportunity*) yang mengarah pada kekuatan atau keunggulan untuk meraih peluang dan tantangan

yang ada. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat.

Dari analisa lingkungan strategis yang telah dilakukan maka dapat strategi Dinas Sosial Kota Pontianak adalah:

1. Sasaran : Meningkatnya Penanganan Program Kemiskinan

Strategi : Meningkatkan Kualitas Pemberdayaan Sosial, Bantuan Sosial, Perlindungan Jaminan Sosial dan Pelayanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Kebijakan : Peningkatan Ketersediaan Data dan Cakupan Pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Yang Akuntabel

Kebijakan yang ditempuh untuk melaksanakan strategi ini dengan mengoptimalkan kewenangan untuk menggalang dukungan stakeholder, pekerja sosial dan instansi vertikal dalam penanganan PMKS; Menggalang lembaga sosial dan tokoh masyarakat untuk meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat miskin. Pemberdayaan ekonomi PMKS melalui bimbingan usaha dan bantuan modal, melaksanakan pelatihan bagi PMKS, percepatan pelayanan dan pengaduan masalah data kemiskinan melalui sistem layanan rujukan terpadu.

2. Sasaran : Meningkatnya Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Perlindungan Jaminan Sosial

Strategi : Meningkatkan dan Mendayagunakan segenap potensi sumber-sumber kesejahteraan sosial untuk peningkatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial

Kebijakan : Pembinaan Aspek Kelembagaan Penanggulangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Kebijakan yang di tempuh untuk melaksanakan strategi ini yaitu Mengintegrasikan berbagai asistensi sosial berbasis keluarga bagi keluarga miskin dan rentan penyandang disabilitas, lanjut usia, anak terlantar, gelandang dan pengemis, memfasilitasi program bantuan pangan non tunai, melakukan pendampingan pelaksanaan program keluarga harapan, pemberian bantuan kepada korban bencana alam dan sosial serta memberikan

pelayanan dan rehabilitasi sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) .

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan Sosial adalah strategi yang bertujuan meningkatkan kualitas kehidupan manusia secara sadar pembangunan sosial lebih berorientasi pada prinsip keadilan sosial. Focus sentralnya lebih dominan ke masalah pendidikan, kesehatan, jaminan sosial. Jika kita melihat cerminan masalah masalah sosial tentu menjadi persoalan bangsa yang diharapkan adanya regulasi kebijakan yang mendukung pembangunan sosial dimana kebijakan yang dirumuskan hendaknya difokuskan kepada tiga dimensi pembangunan sosial dalam hal ini pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja dan peningkatan integrasi sosial. Kebijakan tersebut juga harus mampu di implementasikan dalam berbagai program aksi yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing daerah, yang akan diantisipasi dan akan dipenuhi beberapa kriteria pokok yang perlu dipertimbangkan berdasarkan konsepsi pembangunan pengembangan kebijakan sosial yang memihak pada kelompok marginal melalui pembuatan peraturan dan perundangan yang melindungi pengusaha kecil dari dominasi perilaku ekonomi yang cenderung monopolistic yang perlu digalakan.

Program-program penanggulangan kemiskinan dan pengangguran, keterbelakangan serta peningkatan kualitas kesehatan selain diantisipasi melalui kebijakan langsung yang dampaknya terbatas perlu pula di lengkapi dengan kebijakan kebijakan tidak langsung yang merupakan intervensi langsung dari Pemerintah. Selama ini kalau kita melihat lebih jauh pembangunan kesejahteraan sosial lebih berorientasi pada penanganan masalah kesejahteraan sosial meskipun ini bukan kekeliruan kerangka berpikir seperti ini sering kali di giring menjadi kebijakan dan keputusan pelaku kebijakan terhadap implementasi pembangunan sosial.

Satu aspek yang sangat penting dalam mencapai tujuan tujuan pembangunan adalah memasukan orintasi sosial ke dalam kebijakan kebijakan pembangunan. Hal ini di maksudkan agar suatu regulasi kebijakan dalam orientasi pencapaiannya harus mampu melihat karakter dan kultural otentik daerah masingmasing tanpa melihat suara mayoritas.

Pembangunan pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas, karenanya kebijakan pembangunan memerlukan orintasi sosial

yang difokuskan pada peningkatan kualitas manusia seperti terpenuhinya kebutuhan akan makanan, pakaian, pendidikan, kesehatan dan berbagai aspek kesejahteraan sosial lainnya. Munculnya perhatian terhadap pentingnya aspek sosial Indonesia dengan semakin kompleksnya tantangan pembangunan yang memerlukan penanganan secara terencana dan terstruktur sesuai dengan standar operasional dan prosedural pembangunan sosial. Tantangan pada dasarnya adalah situasi membentang dan kadang menghadang pencapaian tujuan. Harapannya semoga orientasi kebijakan Pemerintah sesuai kebutuhan masyarakat

Kementrian sosial bertanggung jawab pada program penanggulangan kemiskinan bersasaran KK, diantaranya melalui bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) yang saat ini menjadi program prioritas nasional, bantuan langsung tunai bersyarat, bantuan langsung dalam bentuk in-kind misalnya pemberian beras yang dikenal dengan rastra yang saat ini dikenal dengan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) serta himbauan kelompok masyarakat rentan seperti cacat, lansia, yatim/ piatu dan sebagainya

4.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Penyusunan Revisi Renstra Dinas Sosial Kota Pontianak sangat dipengaruhi dan merupakan penjabaran yang lebih detail dari perencanaan pembangunan daerah Kota Pontianak sehingga semua langkah-langkah yang disusun dalam Revisi Renstra Dinas Sosial sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pontianak.

Dengan mempertimbangkan arah pembangunan jangka panjang daerah, kondisi, permasalahan dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu-isu strategis yang berkembang, maka VISI KOTA PONTIANAK untuk 5 Tahun mendatang (2020-2024) adalah :

***“Pontianak Kota Khatulistiwa, Berwawasan Lingkungan ,
Cerdas dan Bermartabat”***

Penjelasan dari Visi diatas adalah sebagai berikut :

Pontianak Kota Khatulistiwa :

Kota Pontianak merupakan Kota di Provinsi Kalimantan Barat yang tepat berada dilintasan garis Khatulistiwa

Berwawasan Lingkungan : Memiliki maksud bahwa aspek lingkungan merupakan hal penting dalam setiap pembangunan di Kota Pontianak menuju Kota yang bersih, hijau, dan teduh

Cerdas :

Kota yang dilengkapi dengan infrastruktur dasar yang nyaman untuk didiami dengan lingkungan yang bersih dan berkelanjutan melalui penerapan solusi cerdas berbasis teknologi informasi serta berorientasi kepada peningkatan kualitas hidup dengan pengelolaan sumber daya kota secara efektif, efisien, inovatif dan terintegrasi.

Bermartabat :

Kota Pontianak memiliki tingkat daya saing dengan masyarakatnya yang berbudaya, toleran terhadap keragaman didukung tata kelola Pemerintahan yang berintegrasi, bersih, melayani, transparansi dan akuntabel.

Untuk mewujudkan visi kota Pontianak Tahun 2020–2024 maka ditetapkan Misi Pembangunan Kota Pontianak sebagai berikut:

1. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan berbudaya;
2. Menciptakan infrastruktur perkotaan yang berkualitas dan representatif;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang didukung dengan teknologi informasi, serta aparatur yang berintegritas, bersih dan cerdas;
4. Mewujudkan masyarakat sejahtera, yang mandiri, kreatif dan berdaya saing;
5. Mewujudkan kota yang bersih, hijau, aman, tertib dan berkelanjutan.

Telaahan terhadap visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan langsung Dinas Sosial. Hal ini ditunjukkan melalui:

1. Pernyataan misi ke 4 : Mewujudkan masyarakat sejahtera, yang mandiri, kreatif dan berdaya saing.

Pada misi ini terlihat jelas peran serta Dinas Sosial dalam memberikan pelayanan berupa Pelayanan Rehabilitasi Sosial dengan urusan wajibnya yang merupakan SPM bidang Sosial yaitu Penyandang Disabilitas Terlantar diluar Panti, Anak Terlantar diluar panti, lanjut usia terlantar diluar panti serta gelandang dan pengemis diluar panti, Pemberian Bantuan dan Jaminan Sosial, dengan urusan wajibnya yang merupakan SPM bidang sosial yaitu Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana Kabupaten/Kota dan pemberdayaan Sosial bagi masyarakat kurang mampu untuk meningkatkan harkat dan martabat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan sosial merupakan salah satu urusan wajib, serta merujuk pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas Sosial tingkat Kota yang meliputi jenis pelayanan dasar terdiri atas Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang

Disabilitas Terlantar di Luar Panti, Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti, Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti, Rehabilitasi Sosial Dasar bagi Lanjut Usia Terlantar, Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana Kabupaten/Kota.

4.3 Program dan Kegiatan

Dengan diterbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah , maka diperlukan adanya penyesuaian terhadap program dan kegiatan serta sub kegiatan yang akan di susun pada Renja Tahun 2021 dan telah sesuai dengan Renstra Revisi 2020-2024 Dinas Sosial Kota Pontianak.

Adapun Program dan kegiatan yang tertuang dalam Renja Dinas Sosial Kota Pontianak Tahun 2021 yang terdiri dari 7 (tujuh) Program 16 Kegiatan dan 63 Sub kegiatan. Secara lengkap rincian program,kegiatan dan sub kegiatan dapat digambarkan dalam tabel berikut ini :

TABEL 4.1
RUMUSAN PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS SOSIAL TAHUN 2021 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2022
KOTA PONTIANAK

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF
	WAJIB								
	BIDANG SOSIAL								
	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	% Peningkatan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	Kota Pontianak	81%	1.808.214.000	APBD		100%	2.869.828.302
	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Pekerja Sosial Bagi Masyarakat	Kota Pontianak	80%	1.915.745.950	APBD		87%	2.869.828.302
	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang mengikuti Pelatihan /Bimtek/Sosialisasi	Kota Pontianak	47 PSM	325.109.950	APBD	107531950	47 PSM	300.000.000
		Jumlah Pelayanan Pengaduan pada Sistem Layanan Rujukan Terpadu	Kota Pontianak	5000 pengaduan	289.498.000	APBD		3000 Pengaduan	200.000.000

		Jumlah Penanganan Pengaduan Masalah Kesejahteraan Sosial	Kota Pontianak	400 pengaduan	372.924.000	APBD		500 Permohonan	469.452.400
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyandang Disabilitas dan Eks Trauma yang mengikuti pelatihan keterampilan	Kota Pontianak	10 Orang	100.000.000	APBD		10 orang	164.000.000
		Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mengikuti pelatihan satpam.otomotif.elektronik dan menjahit	Kota Pontianak	57 orang	402.688.000	APBD		180 Orang	800.000.000
		Jumlah Keluarga Miskin yang menerima Bantuan UEP	Kota Pontianak	15 UEP	95.036.000	APBD		90 UEP	570.995.902
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemberian Bantuan Untuk Lembaga Lanjut Usia	Kota Pontianak	1 Lembaga	24.220.000	APBD		1 Lembaga	50.000.000
		Pemberian Bantuan Untuk Lembaga Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI)	Kota Pontianak	1 Lembaga	39.420.000	APBD		1 Lembaga	40.000.000
		Jumlah Panti Asuhan yang dibantu	Kota Pontianak	28 Panti	120.000.000	APBD		28 panti	120.000.000
	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan penguatan lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	cakupan pelayanan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Sosial (lk3)	Kota Pontianak	30 Orang	38.850.000	APBD		40 orang	47.380.000
	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kerja Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah Potensi Sumber Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSK) yang mengikuti Pelatihan /Bimtek/Sosialisasi	Kota Pontianak	6 orang	108.000.000	APBD		6 orang	108.000.000

	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	(%) Tingkat Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Kota Pontianak	100%	72.500.000	APBD		100%	72.500.000
	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	% Tingkat Penanganan Bagi Warga Negara Imigran Tindak Kekerasan	Kota Pontianak	100%	72.500.000	APBD		100%	72.500.000
	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Psykotik Terlantar yang ditangani dan dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Kota Pontianak	10 orang	72.500.000	APBD		10 orang	72.500.000
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	% Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan layanan rehabilitasi kesejahteraan sosial	Kota Pontianak	100%	1.895.716.400	APBD		100%	2.122.116.500
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandang Pengemis diluar Panti Sosial	% Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Bantuan Sosial	Kota Pontianak	100%	1.015.448.800	APBD		100%	1.213.972.000
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental Spiritual dan Sosial	Penanganan PMKS Anak Terlantar, Gelandang dan Pengemis Terlantar di Pusat Layanan Anak Terpadu (PLAT)	Kota Pontianak	30 Orang	244.260.800	APBD		17 orang	141.372.000

	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Gelandang Pengemis dan Anak Terlantar yang mendapatkan Penanganan	Kota Pontianak	110 orang	105.588.000	APBD		110 orang	122.000.000
	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Mayat terlantar dan otopsi yang ditangani	Kota Pontianak	10 Orang	60.600.000	APBD		10 orang	60.600.000
	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Layanan Data dan Pengaduan	Kota Pontianak	5000 Pengaduan	115.000.000	APBD		5500 Pengaduan	150.000.000
	Penyediaan Permakanan	Jumlah Penyediaan Permakanan	Kota Pontianak	4200 orang	210.000.000	APBD		5000 orang	300.000.000
	Penyediaan Sandang	Jumlah Penyediaan Sandang	Kota Pontianak	350 orang	100.000.000	APBD		350 orang	100.000.000
	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Penyediaan Alat Bantu	Kota Pontianak	5 orang	60.000.000	APBD		5 orang	60.000.000
	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan Kartu Identitas	Jumlah Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan Kartu Identitas	Kota Pontianak	30 orang	5.000.000	APBD		60 orang	10.000.000
	Pemberian Akses ke layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Akses ke layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Kota Pontianak	10 orang	20.000.000	APBD		10 orang	10.000.000
	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Kota Pontianak	30 orang	20.000.000	APBD		30 orang	20.000.000
	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Kota Pontianak	30 orang	25.000.000	APBD		30 orang	15.000.000
	Pemberian Pelayanan Rujukan	Jumlah Pemberian Pelayanan Rujukan	Kota Pontianak	100 orang	50.000.000	APBD		300 orang	225.000.000

	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial	% vPemenuhan Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Kota Pontianak	100%	880.267.600	APBD		100%	908.144.500
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah pembinaan Satgas Bagi PMKS	Kota Pontianak	40 orang	498.860.000	APBD		30 orang	333.144.500
	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya bukan korban HIV.AIDS dan NAPZA	Jumlah Penanganan Rehabilitasi Sosial Untuk Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar ,Lanjut Usia Terlantar serta Gelandang dan Pengemis pada unit Pelayanan Rehabilitasi Sosial (UPRS)	Kota Pontianak	25 orang	381.407.600	APBD		50 Orang	575.000.000
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	% Penerima Bantuan	Kota Pontianak	100%	1.747.177.000	APBD		100%	2.009.277.000
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Data Fakir Miskin Warga Kota Pontianak	Kota Pontianak	80%	1.747.177.000	APBD		85%	2.009.277.000
	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen Data Fakir Miskin Warga Kota Pontianak yang Uodate	Kota Pontianak	29 BA / 2 DOKUMEN	50.000.000	APBD		29 BA / 2 DOKUMEN	812.100.000
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen Data Keluarga Miskin Yang Menerima KIS/KKS	Kota Pontianak	1000 kartu/ 14 Dokumen	47.830.000	APBD		1000 kartu/ 14 Dokumen	47.830.000
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan	Jumlah Pendamping BPNT yang di fasilitasi	Kota Pontianak	36 Pendamping	500.000.000	APBD		36 Pendamping	500.000.000
		Jumlah Pendamping PKH yang difasilitasi	Kota Pontianak	53 Pendamping	1.049.347.000	APBD		53 Pendamping	549.347.000
	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Pengurus dan Pendamping KUBE yang di fasilitasi	Kota Pontianak	30 Kube/3 Pendamping	100.000.000	APBD		30 Kube/3 Pendamping	100.000.000

	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	% Penanganan Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial	Kota Pontianak	100%	669.184.000	APBD		100%	1.227.878.000
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	% Pemberian Perlindungan dan Bantuan Bagi Korban Bencana Alam dan Sosial	Kota Pontianak	100%	619.184.000	APBD		100%	1.177.878.000
	Penyediaan Makanan	Jumlah Pemberian Bantuan Makanan Untuk Korban Bencana Alam dan Sosial	Kota Pontianak	100%	178.100.000	APBD		100%	370.000.000
	Penyediaan Sandang	Jumlah Pemberian Bantuan Sandang Untuk Korban Bencana Alam dan Sosial	Kota Pontianak	100%	170.600.000	APBD		100%	315.000.000
	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Pemberian Bantuan Terpal Untuk Korban Bencana Alam dan Sosial	Kota Pontianak	100%	90.600.000	APBD		100%	150.000.000
	Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	Jumlah Kelompok Rentan yang mendapat bantuan	Kota Pontianak		50.000.000	APBD		100%	252.878.000
	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Pemberian Dukungan Psikososial Untuk Korban Bencana Alam dan Sosial	Kota Pontianak	100%	129.884.000	APBD		100%	90.000.000
	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kabupaten/kota	Jumlah penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kabupaten/kota	Kota Pontianak	100%	50.000.000	APBD		100%	50.000.000
	Koordinasi ,sosialisasi dan pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Koordinasi dan sosialisasi yang dilaksanakan oleh Taruna Siaga Bencana	Kota Pontianak	5 Kali	50.000.000	APBD		5 Kali	50.000.000
	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	% Makam Pahlawan Yang Dikelola	Kota Pontianak	100%	42.330.000	APBD		100%	50.000.000
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	% Peningkatan Sarana dan Prasarana Makam Pahlawan di Wilayah Kota Pontianak	Kota Pontianak	100%	42.330.000	APBD		100%	50.000.000
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kab/Kota	Sarana dan Prasarana Makam Pahlawan Yang direhabilitasi	Kota Pontianak	100%	42.330.000	APBD		100%	50.000.000

	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	% Tingkat Kepuasan Bidang/Bagian Terhadap Pelayanan Kesektarian	Kota Pontianak	100%	6.955.303.775	APBD		100%	8.263.880.600
	Perencanaan ,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Pontianak	19 Dokumen	22.180.000	APBD		19 Dokumen	22.180.000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang di susun	Kota Pontianak	8 Dokumen	8.050.000	APBD		8 Dokumen	8.050.000
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Sub Kegiatan pada Dokumn RKA- SKPD yang di susun	Kota Pontianak	48 sub kegiatan	1.150.000	APBD		48 sub kegiatan	1.150.000
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Sub Kegiatan yang berubah pada Dokumn RKA-SKPD yang di susun	Kota Pontianak	48 sub kegiatan	1.150.000	APBD		48 sub kegiatan	1.150.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja 9LPPD,LAKIP,SPIP,Evaluasi Pengukuran Kinerja) yang di susun	Kota Pontianak	8 Dokumen	6.080.000	APBD		8 Dokumen	6.080.000
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Kota Pontianak	5 Dokumen	5.750.000	APBD		5 Dokumen	5.750.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jangka Waktu Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Pontianak	12 Bulan	5.584.005.775	APBD		12 Bulan	5.770.700.000
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan Tunjangan PNS yang Dibayar	Kota Pontianak	12 Bulan	5.191.305.775	APBD		Bulan	5.378.000.000
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jangka Waktu Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Pontianak	12 Bulan	377.760.000	APBD		12 Bulan	377.760.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Kota Pontianak	18 Dokumen	14.940.000	APBD		18 Dokumen	14.940.000

	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Jangka Waktu Penyelenggaraan Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	Kota Pontianak	1 Dokumen	1.150.000	APBD		1 Dokumen	1.150.000
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD yang di susun	Kota Pontianak	1 Dokumen	1.150.000	APBD		1 Dokumen	1.150.000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang dikelola administrasi kepegawaiannya	Kota Pontianak	33 ASN	57.600.000	APBD		33 ASN	57.600.000
	Pengadaan pakaian Dinas Beserta Atributnya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Kota Pontianak	66 stel	39.600.000	APBD		66 stel	39.600.000
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek	Kota Pontianak	3 Orang	18.000.000	APBD		3 orang	18.000.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jangka Waktu Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pontianak	12 Bulan	817.078.000	APBD		12 Bulan	899.080.000
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jangka Waktu Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Pontianak	12 Bulan	55.000.000	APBD		12 Bulan	55.000.000
	Penyediaan Logistik Kantor	Jangka Waktu Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Pontianak	12 Bulan	125.240.000	APBD		12 Bulan	125.240.000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jangka Waktu Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Pontianak	12 Bulan	240.134.000	APBD		12 Bulan	240.134.000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jangka Waktu Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kota Pontianak	12 Bulan	6.000.000	APBD		12 Bulan	6.000.000
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Tamu Yang difasilitasi	Kota Pontianak	300 orang	129.000.000	APBD		300 orang	129.000.000

	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jangka Waktu Pemenuhan/Fasilitasi Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Kota Pontianak	20 Kali	211.704.000	APBD		22 Kali	293.706.000
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jangka Waktu Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Pontianak	12 Bulan	50.000.000	APBD		12 Bulan	50.000.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Pontianak	12 Bulan	99.998.000	APBD		12 Bulan	99.998.000
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Pontianak	14 Unit	99.998.000	APBD		12 Bulan	99.998.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah	Jangka Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah	Kota Pontianak	12 Bulan	916.880.600	APBD			916.880.600
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jangka Waktu Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Pontianak	12 Bulan	24.000.000	APBD			24.000.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jangka Waktu Penyediaan Layanan Internet, Telepon, Air dan Listrik	Kota Pontianak	12 Bulan	376.948.700	APBD			376.948.700
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jangka Waktu Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Pontianak	12 Bulan	54.301.500	APBD			54.301.500
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jangka Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Pontianak	12 Bulan	461.630.400	APBD			461.630.400
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Yang Dipelihara	Kota Pontianak	110 unit	373.292.000	APBD		110 unit	496.292.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara	Kota Pontianak	8 Unit	255.412.000	APBD		8 Unit	255.412.000

	perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	Kota Pontianak	100 unit	87.880.000	APBD		100 unit	117.880.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/Rehabilitasi	Kota Pontianak	1 Gedung Kantor	30.000.000	APBD		1 Gedung Kantor	123.000.000
JUMLAH					14.214.837.725				16.615.480.402

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasi berbagai persoalan-persoalan terkait dengan persoalan masyarakat khususnya dalam bidang sosial sebagai wujud nyata dari tanggung jawab Pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan kehidupan harkat dan martabat manusia seutuhnya dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (stakeholders) dalam menciptakan kehidupan masyarakat Kota Pontianak yang berharkat dan bermartabat sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah (trickle down effect) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Output Rencana Kerja Dinas Sosial Kota Pontianak adalah Program Tahunan Dinas Sosial Kota Pontianak yang sesuai Tupoksi dan sasaran Program Dinas Sosial Kota Pontianak. Rencana Kerja (RENJA) Dinas Sosial Kota Pontianak ini disusun sebagai bahan acuan serta evaluasi dalam pelaksanaan kegiatan Tahun anggaran 2021, dengan Renja pelaksanaan anggaran diharapkan dapat memberikan gambaran pelaksanaan kegiatan Dinas Sosial Kota Pontianak, sehingga Perencanaan dan Penganggaran yang dibuat dapat berhasil dan berdaya guna bagi pembangunan masyarakat Kota Pontianak.



Kepala Dinas Sosial

Kota Pontianak,

drh.ASWIN DJA'FAR

Pembina Utama Muda

NIP.19630901 199103 1 007